PENGARUH TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)

Ferlia Herdayanti

Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

Abstract

Local Government Performance is influenced by several factors, including Transparency and Participation Budgeting. There is a phenomenon varibael Local Government Performance report results untransparancy, clearly illustrated in the Report Description Accountability for Fiscal Year 2014, as well as variable Participation Budgetary there is ample program you want to run by the local government does not comply with the planned budget, the result when entered into the implementation phase of the program the hard run. This study aims to determine Budgetary Transparency and Participation of the Local Government Performance.

The method used in this research is descriptive and verification methods. The verification method used to test the hypothesis by using statistical test that Structural Equation Model (Structural Equation Model-SEM) based variance or Partial Least Square (PLS).

*The result showed that no violation of the PLS method. the results of this study show that transparency affect the Local Government Performance. Likewise Participation Budgeting affect the Local Government Performance***.**

Keyword: *Transparency, Participation Budgeting, and Performance Local Government.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah, telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Dalam rangka untuk mewujudkan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam menjalankan otonomi daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dimana konsep ini menuntut adanya pengembangan kinerja institusi baik pemerintah, bisnis dan masyarakat secara komprehensif pada semua tingkatan (Patriadi, 2004).

Hal ini harus didukung dengan adanya akuntabilitas publik yang merupakan syarat terbentuknya pemerintahan yang baik (good govenance) (Sisca Mutiara Sari,2014). Bahwa Good Governance dapat dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara (Wiranto, 2012:1). Karakteristik pelaksanaan Good Governance meliputi antara lain transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency dan effectiveness, serta accountability (Mardiasmo, 2006). Dari karakterikstik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, value for money, dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2006)

Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ulum, 2012:20).

Kinerja itu sendiri adalah Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang

tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi, pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan secara akuntabel dan transparan (Chabib Soleh dan Suripto, 2011:3).

Banyak penelitian dan pendapat yang mengatakan bahwa terdapat kaitan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik (Rahmanurrasjid, 2008:146-147). Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat, implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Lucy Auditya, 2013).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, penyelengaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria: adanya pertanggungjawaban terbuka; adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan; adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja Annisaningrum (2010).

Hasil Penelitian terdahulu mengatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini, semakin tinggi tingkat transparansi maka kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan semakin baik tetapi dalam penerapan transparansi beberapa SKPD belum melakukan azas-azas transparansi secara optimal (Lucy Auditya, 2013).

Sebagai salah satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dilaksanakan kewajiban pertanggungjawaban yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk penetapan anggaran (Mardiasmo, 2002).

Partisipasi penyusunan anggaran sebagai salah satu kekonsistensian seseorang dalam proses penyusunan anggaran.Partisipasi anggaran adalah salah satu cara untuk menciptakan sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan institusi yang terkait (Anggraeni ,2009).

Dalam proses penganggaran aparat pemerintah diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, yaitu melaui perencanaan anggaran. Hal tersebut sangat penting berkenaan dengan adanya peningkatan kepuasan dan pegawai akan merasa lebih produktif sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang mendorong peningkatan kinerja (Mediaty 2010).

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu (Bastian, 2006;163). Partisipasi anggaran adalah salah satu cara untuk menciptakan sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan institusi yang terkait (Anggraeni, 2009). Pihak-pihak inilah yang akan memainkan peranan penting dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari partisipasi dalam proses penyusunan anggaran (M.Nafarin 2007:11).

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat
2. Seberapa besar pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi mengenai transparansi, partisipasi penyusunan anggaran, serta bukti bahwa transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh dengan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi mengenai pengendalian intern, partisipasi penyusunan anggaran, dan kinerja pemerintah daerah Kegunaan praktis penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Instansi
   Sebagai bahan pemikiran bagi Inspektorat untuk dapat mengetahui pengaruh signifikan dari transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan.
2. Bagi Pihak Lain
   Sebagai informasi, bahanrujukan dan referensi bagi pengembangan konsep tentang bagaimana pengaruh transparansi, partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah

1.4.2 Kegunaaan Akademis

1. Bagi pengembang ilmu akuntansi sektor publik
   Dapat menambah pengetahuan dan memberikan referensi ilmiah khususnya akuntansi sektor publik mengenai pengaruh transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dengan membuktikan teori serta hasil penelitian terdahulu.
2. Bagi peneliti
   Dapat meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta memecahkan masalah yang diangkat penulis mengenai transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini juga berguna untuk sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Komputer (UNIKOM) Indonesia Bandung.
3. Bagi peneliti lain
   Diharapkan dapat memberikanpengetahuan dan informasi atau referensi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

1. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2006:45) menjelaskan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

2. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Ida Bagus (2010:19) menjelaskan partisipasi penyusunan anggaran adalah Partisipasi penyusunan anggaran adalah proses pengambilan keputusan bersama dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya, dengan kata lain pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam prosesnya.

3. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib Soleh dan Suripto (2011:3) Pengertian Kinerja adalah Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi.

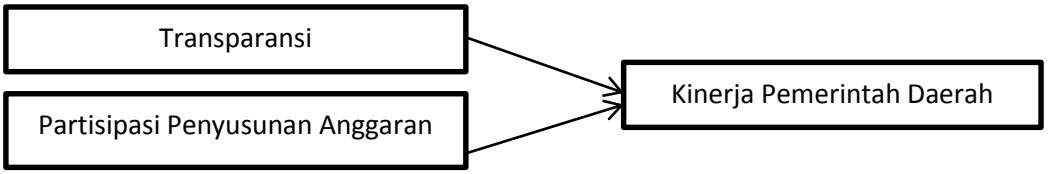
2.2 Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut penelitian Fifit Purnama Dan Nadirsyah (2016) transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Lucy Auditya, Husaini, Lismawati (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

2. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sisca Mutiara Sari, Kirmizi, Yuneita Anisma (2014) dalam penelitiannya mengatakan Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian Ni Luh Sri Rahayu, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Ni Kadek Sinarwati (2014) menyatakan Partisipasi penyusunan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Solikhun Arifin, Abdul Rohman (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

H_2 : Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, agar penelitian yang dilakukan lebih teratur dan sistematis. Dengan membuat desain penelitian, penyusunan sebuah karya tulis pun akan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Desain penelitian menurut Husein Umar adalah sebagai berikut : "Desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian" Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan suatu cara bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat penting agar pembuatan sebuah karya tulis dapat terselesaikan secara cepat dan baik. Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu. Menurut Sugiono terdapat enam aspek utama didalam proses penelitian yaitu:

1. Rumusan Masalah
2. Landasan Teori
3. Perumusan hipotesis
4. Pengumpulan data
5. Analisis data
6. Kesimpulan dan saran.

Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, dengan pertanyaan ini maka akan dapat membantu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat
2. Seberapa besar pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Teori dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab semua rumusan masalah penelitian tersebut. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kuat bukan sekedar perbuatan coba – coba. Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Karena itu dalam penelitian ini, penulis memasukkan teori – teori yang berhubungan dengan judul yang diambil.

Jawaban terhadap rumusan masalah yang berdasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual) maka jawaban itu disebut hipotesis. Hipotesis yang dibuat pada penelitian ini adalah Terdapat pengaruh transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah SKPD Kabupaten Bandung Barat.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran serta variabel dependen Kinerja pemerintah Daerah Adapun tabel operasionalisasi sesuai dengan variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionaliasi Variabel

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	No Kuesioner
1	Transparansi (X_1)	Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. **Mardiasmo (2006:45**)	1. Kesediaan dan Aksesibilitas dokumen	Ordinal	1-2
			2. Kejelasan dan Kelengkapan informasi		3-4
			3. Keterbukaan Proses		5
			4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi **Kristianten (2006:73)**		6
2	Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_2)	Adanya keterlibatan upaya dan input oleh manajer dalam penyusunan anggaran. **Ida Bagus Agung D (2010:80)**	1. Keterlibatan	Ordinal	7-8
			2. Pengaruh		9-10
			3. Komitmen ***Brownell* dalam Falikhatun (2007)**		11-12
3	Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan, perencanaan strategis (strategic, planning) suatu organisasi.	1. Indikator masukan (Input)	Ordinal	13-14
			2. Indikator proses (Process)		15-16
			3. Indikator keluaran (Output)		17
			4. Indikator hasil (Outcomes)		18
			5. Indikator manfaat (Benefit)		19
			6. Indikator dampak (Impact) **Mohamad Mahsun (2006:77)**		20

		Chabib Soleh dan Suripto (2011:3)			

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan guna mendapatkan data untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Field Reseach (Penelitian Secara Langsung)
   a. Observasi, peneliti terlebih dahulu menentukan tempat penelitian dan melakukan survey terhadap tempat dalam hal penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah.
   b. Kuesioner, teknik kuesioner yang peneliti gunakan adalah kuesioner tertutup. Suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Sub. Bagian keuangan, Sub. Perencanaan dan Program Dengan harapan mereka bisa memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
   c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung kepada pegawai SKPD Kabupaten Bandung Barat mengenai pengendalian intern, partisipasi penyusunan anggaran, dan kinerja pemerintah daerah
2. Library Reseach (Studi Pustaka)

   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku, jurnal, artikel, peraturan perundang – undangan , website dan penelitian – penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.4 Teknik Penarikan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014:80), mengemukakan pengertian populasi sebagai berikut: Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi dalam penelitian ini adalah 12 Dinas Kabupaten Bandung Barat. Unit observasi dalam penelitian ini adalah Sub. Bagian Keuangan sebanyak 24 dan Sub bagian Program dan Anggaran SKPD Kabupaten Bandung Barat sebanyak 24, sehingga total populasi dalam penelitian ini sebanyak 48 orang.

3.4.2 Sampel

Menurut Umi Narimawati (2010:38) adalah sebagai berikut Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2011:126) mengatakan bahwa Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah seluruh dari populasi yaitu Sub. Bagian Program dan Anggaran berjumlah 24 orang dan Sub. Bagian Keuangan 24 orang.

3.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi, cara ini telah mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi, apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi. Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis.

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K (2009:112) pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

> "Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karenanya harus ditolak".

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,05 sebesar 1,999.

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Persamaan model struktural:

$$\eta = \beta \xi_1 + \zeta$$

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dengan 4 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 6 indikator. Model struktural yang akan diuji digambarkan sebagai berikut:

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan dengan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_o : β = 0 : Pengaruh ξ_1 terhadap η tidak signifikan

H_1 : β ≠ 0 : Pengaruh ξ_1 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\beta}{SE(\beta)}$$

Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk α = 0,05 sebesar 1,999.

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Persamaan model struktural:

$$\eta = \gamma \xi_2 + \zeta$$

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dengan 3 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 6 indikator

Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_o : γ = 0 : Pengaruh ξ_2 terhadap η tidak signifikan

H_1 : γ ≠ 0 : Pengaruh ξ_2 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\lambda}{SE(\lambda)}$$

Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk α = 0,05 sebesar 1,999.

3) Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesis dapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.



Sumber : Sugiyono dalam Umi Narimawati (2010:54)

Gambar 3.2
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Transparansi

Persentase tanggapan untuk variabel Transparansi sebesar 60%, menurut tabel 3.9 angka tersebut termasuk kategori Cukup karena berada pada interval 52,01%- 68,00%. Besaran ini tidak mencapai 100% dan memiliki gap yang cukup jauh yaitu sebesar 40%. Gap sebesar 40% ini menunjukan penyebab Transparansi pada Dinas Kabupaten Bandung Barat belum mencapai tingkat ideal.

4.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Persentase tanggapan untuk variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran sebesar 66%, menurut tabel 3.9 angka tersebur termasuk kategori Cukup karena berada pada interval 52,01 % - 68,00 %. Besaran ini tidak mencapai 100% dan memiliki gap sebesar 34, Gap sebesar 34% ini menunjukan penyebab Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2) pada Dinas Kabupaten Bandung Barat belum mencapai tingkat ideal.

4.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Persentase tanggapan untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 65%, menurut tabel 3.9 angka tersebut termasuk kategori Cukup karena berada pada interval 52,01 % - 68,00 %. Besaran ini tidak mencapai 100% dan memiliki gap sebesar 35%. Gap sebesar 35% ini menunjukan penyebab Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas di Kab. Bandung Barat belum mencapai tingkat ideal.

4.4 Analisis Verifikatif

1. Keterkaitan Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Nilai koefisien korelasi menunjukan keeratan hubungan antara variabel laten *eksogen* dengan variabel laten *endogen*. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *software SmartPLS* v.3.2.4, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Koefisien Korelasi

Variabel Laten	Korelasi
Transparansi (X1)> Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.802
Partisipasi Penyusunan Anggaran(X_2) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.838

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.4

a) Nilai koefisien korelasi yang diperoleh untuk variabel Transparansi (X1) dengan Kinerja Pemmerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0.802, berdasarkan pada tabel 4.32, angka tersebut termasuk dalam kategori High correlation; Marked relationship/Tinggi karena berada pada interval 0.70-0.90. nilai koefisien korelasi bertanda positif yang menandakan hubungan yang searah, artinya jika Dinas di Kabupaten Bandung Barat memiliki Transparansi yang baik maka akan berdampak pada semakin baik pula terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
b) Nilai koefisien korelasi yang diperoleh untuk variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_2) dengan Kinerja Pemerintah Daerah Daerah (Y) adalah sebesar 0.838, berdasarkan pada tabel 3.11 angka tersebut termasuk dalam kategori *High correlation/Marked relationship/Tinggi* karena berada pada interval 0.70-0.90. nilai koefisien korelasi bertanda positif yang menandakan hubungan yang searah, artinya jika semakin baiknya Partisipasi Penyusunan Anggaran maka akan berdampak pada semakin baik pula terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Koefisien determinasi merupakan angka yang menunjukan sebesar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan perangkat lunak bantuan SmartPLS v.3.2.4, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2
Koefisien Determinasi

Variabel Laten	Rsquare
Transparansi (X1)> Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.781
Partisipasi Penyusunan Anggaran(X2) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.4

Pada tabel 4.2 di atas, terlihat nilai R_{Square} yang diperoleh adalah sebesar 0,781 atau 78.10%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Transparansi (X_1) dan Partisipasi Penyusunan Anggaran(X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 78.10% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Daerah (Y), sedangkan sebanyak (1-R_{Square}) 21.9% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Untuk mengetahui besar kontribusi pengaruh dari setiap variabel laten *eksogen* terhadap variabel laten *endogen* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Kontribusi Pengaruh Variabel Laten *Eksogen* terhadap Variabel Laten *Endogen*

Variabel Laten	Koefisien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung		Total Pengaruh Langsung
			X_1	X_2	
Transparansi (X_1)> Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.408	0.408^2=16.6		16.05	32.65%
Partisipasi Penyusunan Anggaran(X_2) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.542	0.542^2=29.4	16.05		45.45%
				Total	**78.1%**

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.4

Nilai-nilai yang tersaji pada tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Transparansi memberikan pengaruh secara parsial sebesar 32.65% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan rincian 16.6% pengaruh langsung dan 16.05% merupakan pengaruh tidak langsung melalui Partisipasi Penyusuanan Anggaran.
b) Partisipasi Penyusunan Anggaran memberikan pengaruh secara parsial sebesar 45.45% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan rincian 29.4% pengaruh langsung dan 16.05% merupakan pengaruh tidak langsung melalui Transparansi.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan pengaruh sebesar 32.65%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Tinggi yaitu sebesar 0.802. t_{hitung} diperoleh sebesar 2.160, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} *2.018*, sehingga dapat disimpulkan bahawa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti Transparansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dinas di Kabupaten Bandung Barat. Transparansi memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, yang berarti semakin baik Transparansi maka akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah semakin baik pula. Dalam penelitian ini Transparasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap sebesar 40% untuk variabel Transparansi dan 35% untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam Transparansi yang dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil tanggapan responden, yang menjadi kekurangan utama dalam Transparansi adalah "ketersediaan dan aksesibilitas dokumen". Hasil penelitian yang menunjukan arah hubungan yang positif ini juga di dukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yaitu menurut Chabib Soleh dan Suripto (2011:5) bahwa kinerja pemerintah daerah memiliki arti yang sangat penting bukan saja bagi masyarakat selaku pemilik kedaulatan, dan para donator selaku penyumbang dana, tetapi juga penting bagi Pemerintah Daerah sendiri selaku Eksekutif, terlebih-lebih bagi DPRD yang secara fungsional memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Salah satu arti penting dari kinerja pemerintah daerah adalah meningkatkan derajat kepercayaan kepada masyarakat, bahwa dana publik yang dipercayakan kepadanya, telah dipergunakan sesuai amanat yang diberikan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penlitian sebelumnya menurut Fifit Purnama Dan Nadirsyah (2016) transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin

transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Lucy Auditya, Husaini, Lismawati (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Lalu Natak Riswanto (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa transparansi yang diinformasikan kepada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan benar, sesuai dan seksama maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

2. Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan pengaruh sebesar 45.45%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Tinggi yaitu sebesar 0.838 (0.70-0.90). t_{hitung} diperoleh sebesar 2.920, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} *2.018*, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang Partisipasi Penyusunan Anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Barat. Partisipasi Penyusunan Anggaran memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan semakin baiknya Partisipasi Penyusunan Anggaran maka akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Barat semakin baik pula. Dalam penelitian ini Partisipasi Penyusunan Anggaran belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap sebesar 34%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama dalam hal Keterlibatan. Hasil penelitian yang menunjukan arah hubungan yang positif ini juga di dukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yaitu menurut Menurut (Sisca Mutiara Sari,dkk;2014) Salah satu fungsi dari partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai sarana komunikasi antara bawahan dan atasan, tidak hanya seputar masalah anggaran, tetapi juga isu yang terkait didalamnya. Partisipasi anggaran memungkinkan bawahan untuk bertukar dan mencari informasi dari atasan mereka, yang tentunya dapat mendukung terciptanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penentuan anggaran dan urusan keorganisasian lainnya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penlitian sebelumnya menurut menurut Sisca Mutiara Sari, Kirmizi, Yuneita Anisma (2014) dalam penelitiannya mengatakan Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian Ni Luh Sri Rahayu, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Ni Kadek Sinarwati (2014) menyatakan Partisipasi penyusunan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan dari hasil penelitian Solikhun Arifin, Abdul Rohman (2012) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, serta beberapa pengujian penelitian mengenai Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada 12 Dinas di Kabupaten Bandung Barat, maka dapat di rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah SKPD Kabupaten Bandung Barat. Penerapan transparansi memiliki hubungan erat yang kuat terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diterapkannya transparansi maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan

bahwa variabel penerapan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan.

Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah SKPD Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik partisipasi penyusunan anggaran maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai pengaruh Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

5.2.1 Saran Praktis

Untuk meningkatkan kualitas Transparansi, sebaiknya instansi dalam ketersediaan dan aksesbilitas dokumen Laporan Pertanggungjawaban diharapkan dapat di laksanakan dengan selalu mem-publish isi laporan kegiatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ada. Selain itu, instansi juga disarankan untuk memperbaiki anggaran yang boros sebaiknya semua pihak terkait dilibatkan pada proses penyusunan anggaran dan semua pihak terkait tersebut tidak hanya dilibatkan tetapi mereka diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi memberikan pendapat. Selain dari pada itu adapun masalah yang paling kurang baik yaitu pada komitmen salah satunya pada pendapat pegawai yang tidak diterima saat penyusunan anggaran. Dengan memperbaiki masalah keterlibatan, pengaruh, komitmen maka partisipasi penyusunan anggaran akan berjalan dengan baik dan akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah yang semakin baik pula.

Kemudian, untuk memperbaiki anggaran yang boros sebaiknya semua pihak terkait dilibatkan pada proses penyusunan anggaran dan semua pihak terkait tersebut tidak hanya dilibatkan tetapi mereka diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi memberikan pendapat. Selain dari pada itu adapun masalah yang paling kurang baik yaitu pada komitmen salah satunya pada pendapat pegawai yang tidak diterima saat penyusunan anggaran. Dengan memperbaiki masalah keterlibatan, pengaruh, komitmen maka partisipasi penyusunan anggaran akan berjalan dengan baik dan akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah yang semakin baik pula.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, instansi diharapkan untuk memberikan hasil dari segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara baik dan cepat.

5.2.2 Saran Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian. Bagi peneliti selanjutnya disarankan sebaiknya memperluas, meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta memecahkan masalah yang diangkat penulis mengenai pengendalian intern dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

VI Daftar Pustaka

Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government* : Malang : Bayumedia Publishing.

Anggraeni, Rafika. 2009. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.*

Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan.* (Online).Tersedia Di World Wide Web:Http//Ovy19.Wordpress.Com

Arifin, Solikhun. 2012. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Komitmen Organisasi. Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating.*

Auditya, Lucy., Husaini Dan Lismawati. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, Jurnal *Fairness* Vol. 3, No.1

Budi Sastra Wiguna Made, dkk. 2015. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*, e-*Journal* S1 Ak Universitas Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015).

Chabib Soleh dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Jatinangor :* FOKUSMEDIA.

Dhaemanegara, Ida Bagus Agung. 2010. *Penganggaran Perusahaan Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik, Ed.1*. Andi: Yogyakarta.

Mediaty. 2010. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.* Majalah Ekonomi.Vol.Xx(3): 299-311.

Mutiara Sari, Sisca., Kirmizi Dan Yuneita Anisma. 2014. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating.* Jurnal Universitas Riau.

Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan.* Salemba Empat: Jakarta

Patriadi, Pandu. 2004. *Manfaat Konsep Good Governance Bagi Institusi Pemerintah Dan Bumn Dalam Kebijakan Privatisasi Bumn.*

Purnama Fifit, Nardiansyah. 2016. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya.* Jurnal. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 2, (2016) Halaman 01-15.

Riswanto Natak. 2016. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.* Jurnal.

Ulum, Ihyalul. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Aksara: Jakarta.

Uma Sekaran. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati, dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah.* Bekasi: Genesis.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Anggraeni, Rafika. 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Skripsi. Universitas Sumatra Utara.

Bastian Indra, 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi SektorPublik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006. Hal 2-4.

Rahmanurrasjid, Amin. (2008). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro.pemerintah, dan pengawasan fungsional.

Wiranto, Tatang. (2012). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. (online). (diakses tanggal 5 Nopember 2012). Tersedia di World Wide Web: http://www.depkominfo.go.id.